

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pelaksanaan PEMILU (Pemilihan Umum) di Indonesia. Sebutan KPU tersendiri bagi masyarakat Indonesia mulai akrab terdengar sejak era pasca reformasi. Lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebenarnya sudah ada, di era Presiden Soekarno lembaga penyelenggaraan pemilu itu dinamai dengan sebutan PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) berdasarkan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan PPI.

Sementara pada era Orde Baru, di mana pada saat Presiden Soeharto memimpin Indonesia sebutan lembaga penyelenggara Pemilu di kenal dengan sebutan LPU (Lembaga Pemilihan Umum), Hal itu di perkuat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1970. Selanjutnya setelah era pasca reformasi yang di tandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya dan mengangkat B.J Habibie inilah awal sejarah KPU di Indonesia terbentuk. LPU bentukan Presiden Soeharto pada 1970 ditransformasi menjadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999.¹

Pembentukan KPU ini mengingat desakan masyarakat yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Sebab pemerintahan dan lembaga-lembaga lain adalah produk Pemilu 1997 era orde baru yang sudah tidak lagi dipercaya oleh

¹ www.kpu.go.id di akses pada 15 Februari 2020.

rakyat Indonesia. Sehingga Pemilu 1999 diadakan untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan masyarakat termasuk dunia internasional.²

Setelah beberapa kali mengalami perubahan nama lembaga penyelenggara pemilu, nama KPU tetap di pertahankan semenjak era Presiden Habibie samapai ke Presiden Jokowi. Hanya saja jumlah Komisionernya yang berubah-ubah dari jumlah 53 orang era Habibie menjadi 11 orang era Presiden Gus Dur, hingga di revisi kembali menjadi 7 orang di era Presiden SBY dan sampai saat ini era Presiden Jokowi jumlah Komisioner KPU RI tetap berjumlah 7 orang.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum.³

Dari peraturan undang-undang tersebut, terbentuklah KPU di setiap wilayah di Indonesia baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. SUMSEL (Sumatera Selatan) merupakan salah satu Provinsi yang terletak di pulau Sumatera yang saat ini memiliki 17 kab/kota di dalamnya dan semuanya telah di bentuk lembaga penyelenggara Pemilu yang kita kenal dengan sebutan KPU.

Akan tetapi berdasarkan aturan baru, dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang lembaga penyelenggara Pemilu, di sebutkan bahwa yang di

² Arum Sutrisni Putri, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/13/070000869/kpu--sejarah-singkat-visi-misi-tugas-dan-wewenang?page=all>, di akses pada 29/02/2020.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum di akses pada 29/02/2020.

maksud dengan penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan wakil Presiden yang di pilih langsung oleh rakyat. Maka dalam Undang-undang tersebut di sebutkan juga bahwa lembaga penyelenggara Pemilu terbagi menjadi 3 lembaga yang memiliki tugas masing-masing yaitu sebagai berikut :⁴

Pertama, KPU, bersifat nasional, tetap, mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Adapun jumlah anggota KPU tersendiri dari mulai tingkat pusat samapi ke daerah jumlahnya bervariasi. Tingkat pusat memiliki 7 orang anggota dengan bidang-bidang di antaranya Ketua KPU, bidang teknis penyelenggara, bidang perencanaan, keuangan dan logistik, bidang hukum dan pengawasan, bidang sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengembangan SDM, bidang hubungan masyarakat, data informasi dan hubungan antar lembaga, bidang umum, rumah tangga dan organisasi.⁵

Kedua, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga memiliki jumlah anggota bervariasi, jika di tingkatan pusat berjumlah 5 orang, tingkatan provinsi 5 atau 7 orang dan tingkatan kab/kota berjumlah 3 atau 5 orang. Perbedaan jumlah anggota tersebut tergantung dari kebutuhan daerah dengan di lihat dari jumlah suara.⁶

⁴ <http://indonesiabaik.id/infografis/tiga-lembaga-penyelenggara-pemilu-apa-saja>, di akses pada 08 September 2020.

⁵ <https://m.detik.com/news/berita/d-3473111/ini-struktur-lengkap-kpu-ri-2017-2022>, di akses pada 08 September 2020

⁶ <https://akurat.co/id-51851-read-jumlah-anggota-kpu-dan-bawaslu-provinsi-bervariasi-ini-penjelasan-nya>, di akses pada 08 September 2020.

Ketiga, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik dalam penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berjumlah 7 orang dari unsur KPU, BAWASLU, DPR dan Pemerintah.⁷

Tugas dan wewenang KPU diantaranya termaktub dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga di tambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai di maksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum di laksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.⁸

Pasca Reformasi tahun 1999 Pemilu di Indonesia terus dilaksanakan secara teratur dan lancar sesuai dengan asas demokrasi yang di anut Negara Indonesia ini. Namun pada tahapan pelaksanaan pemilu yang telah di laksanakan angka GOLPUT (Golongan Putih) di Indonesia cenderung meningkat setiap pelaksanaannya. Semenjak pasca reformasi pada pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih mencapai 92,6 persen dan jumlah golput 7,3 persen.⁹

⁷ *Op.Cit.* Indonesiabaik.id

⁸ *Op.Cit.* id.wikipedia.id

⁹ Sendhikasari, *Partisipasi Pemilih menjelang pemilu 2014*, dalam Jurnal Info Singkat Pemerintahan dalam Negeri Vol. V, No.18/II/P3DI/September/2013, hlm. 17.

Berikutnya angka partisipasi pada pemilu 2004 mengalami penurunan yang cukup drastic, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada pemilu tahun 2009 tingkat partisipasi pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 22,1 persen.¹⁰ Sedangkan pada pemilu 2014 tingkat partisipasi mengalami kenaikan di angka 75,11 persen.¹¹

Di SUMSEL (Sumatera Selatan) berdasarkan data yang di himpun angka partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2009 mencapai 75,02%, sementara tahun 2014 angka partisipasi menurun menjadi 72,1%, sedangkan pada pemilu serentak tahun 2019 angka partisipasi pemilih di SUMSEL meningkat di angka 84,02%.¹² Dari data yang di hasilkan, angka terebut melampaui target partisipasi nasional yakni 77,5 persen.¹³ Berikut presentase hasil Pemilu Presiden di SUMSEL tahun 2009, 2014 dan 2019 :

No	Kab/Kota	Pemilu 2009		Pemilu 2014		Pemilu 2019	
		DPT	Partisipasi	DPT	Partisipasi	DPT	Partisipasi
1	Palembang	1.070.594	749.064	1.144.014	759.609	1.126.087	925.545
2	OKI	504.961	404.835	556.137	421.286	523.263	442.382
3	Ogan Ilir	279.043	202.520	301.226	202.235	288.973	249.127
4	OKU Timur	433.249	363.213	476.372	377.651	487.124	409.882
5	OKU	233.375	169.992	251.897	171.656	258.062	219.424
6	OKU Selatan	231.080	179.926	260.387	187.847	269.099	227.762
7	Muara Enim	491.046	373.250	536.090	391.426	417.526	359.054
8	Prabumulih	111.389	84.744	133.212	89.427	131.191	114.890
9	Pali					131.576	113.597
10	Lahat	266.413	202.076	293.043	206.334	297.014	259.265
11	Empat	171.237	107.038	181.487	109.779	200.425	169.070

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹Yulistyo Pratomo, <https://m.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>,

¹² Data PPID KPU SUMSEL

¹³ Yudi Abdullah <https://www.antaranews.com/berita/868612/partisipasi-pemilu-di-sumsel-814-persen>

	Lawang						
12	Pagaralam	94.494	69.765	104.520	71.228	104.522	92.330
13	Musi Rawas	377.404	298.550	427.693	317.485	289.544	248.065
14	Lubuk Linggau	140.245	99.524	154.693	103.990	160.885	135.088
15	Muratara					148.678	125.938
16	Musi Banyuasin	391.618	280.479	457.803	298.452	449.854	370.073
17	Banyuasin	515.939	402.038	586.451	409.713	593.746	477.093
Jumlah		5.314.075	3.987.014	5.865.025	4.118.118	5.877.575	4.938.585
			(75,02%)		(72,01%)		(84,02%)

Naiknya angka partisipasi masyarakat pada pemilu Presiden tahun 2019 juga di imbangi dengan hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang juga turut mengalami peningkatan. Di mana hasil pemilu legislatif tahun 2019 menunjukkan angka partisipasi yang tinggi yaitu mencapai angka 83,95%, dengan data sebagai berikut :

No	DAPIL	Kabupaten/Kota	Data Pemilih (DPT)			Penggunaan Hak Pilih			Tingkat Parmas (%)		
						(DPT+DPTb+DPK)					
			L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Total
1	1	Musi Rawas	147.171	142.373	289.544	125.194	122.767	247.961	85,07	86,23	85,65
2	1	Musi Banyuasin	229.124	220.730	449.854	186.586	183.011	369.597	81,43	82,91	82,17
3	1	Banyuasin	300.992	292.754	593.746	238.654	238.439	477.093	79,29	81,45	80,37
4	1	Palembang	557.261	568.826	1.126.087	448.689	476.793	925.482	80,52	83,82	82,17
5	1	Lubuk Linggau	79.449	81.436	160.885	65.583	69.375	134.958	82,55	85,19	83,87
6	1	Muratara	74.488	74.190	148.678	62.717	63.178	125.895	84,20	85,16	84,68
7	2	Ogan Komering Ulu	131.010	127.052	258.062	110.538	108.707	219.245	84,37	85,56	84,97
8	2	Ogan Komering Ilir	268.604	254.665	523.269	222.516	218.897	441.413	82,84	85,95	84,40
9	2	Muara Enim	209.915	207.611	417.526	178.510	179.966	358.476	85,04	86,68	85,86
10	2	Lahat	150.592	146.422	297.014	130.178	128.924	259.102	86,44	88,05	87,25
11	2	OKUT	247.890	239.234	487.124	206.950	202.760	409.710	83,48	84,75	84,12
12	2	OKUS	139.139	129.960	269.099	118.562	109.200	227.762	85,21	84,03	84,62
13	2	Ogan Ilir	144.924	144.049	288.973	122.232	125.929	248.161	84,34	87,42	85,88
14	2	Empat Lawang	101.957	98.468	200.425	85.349	83.721	169.070	83,71	85,02	84,37
15	2	Pagaralam	53.319	51.203	104.522	46.828	45.434	92.262	87,83	88,73	88,28
16	2	Prabumulih	64.536	66.655	131.191	55.423	59.096	114.519	85,88	88,66	87,27
17	2	Pali	65.308	66.268	131.576	55.509	58.088	113.597	85,00	87,66	86,33
		TOTAL	2.965.679	2.911.896	5.877.575	2.460.018	2.474.285	4.934.303	82,95	84,97	83,95

Melihat angka di atas dimana terjadi penurunan angka partisipasi pemilih sebelum pelaksanaan pemilu serentak 2019, dalam suatu proses demokrasi menurunnya tingkat partisipasi pemilih atau meningkatnya jumlah Golput akan berimplikasi negatif bagi pembangunan kualitas demokrasi.¹⁴ Fenomena penurunan angka partisipasi pemilih tersebut tentu akan menjadi peringatan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Meskipun tidak ada aturan dalam undang-undang yang mengatakan partisipasi rendah menjadikan pemilu tidak sah, akan tetapi partisipasi publik sangat penting, karena pemilu merupakan fase terpenting dalam kehidupan sebuah negara demokrasi seperti Indonesia.¹⁵

Peran KPU sebagai penyelenggara pemilu mempunyai tanggung jawab terhadap persoalan angka partisipasi pemilih. Masyarakat yang tidak datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan tidak menggunakan hak pilihnya tentu akan menjadi tanggung jawab KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Meskipun persoalan keinginan masyarakat menggunakan hak pilihnya atau tidak salah satunya di pengaruhi oleh sosok tokoh yang akan dipilih, akan tetapi KPU harus mempersiapkan dan mempunyai strategi secara matang untuk memobilisasi masyarakat datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

Fenomena pemilu 2019 berbeda dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya, dimana di tahun 2019 pelaksanaan PILEG (Pemilihan Legislatif) dan PILPRES (Pemilihan Presiden) di laksanakan secara bersamaan. Artinya dari pelaksanaan yang dilakukan secara bersamaan tersebut masyarakat dituntut untuk mencoblos 5

¹⁴ Soebagio, *Implikasi golongan putih dalam perspektif pembangunan demokrasi di Indonesia* dalam Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 12, No. 2, Desember, 2008.

¹⁵ Sendhikasari, *Op.,Cit*

kali di waktu bersamaan yaitu mulai dari mencoblos calon Presiden dan Wakilnya, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Dampak dari pelaksanaan pemilu serentak terhadap angka partisipasi menurut analisa penulis pemilu serentak teridikasi dapat menimbulkan penurunan angka partisipasi pemilih di lihat dari indikator banyaknya kertas suara yang di coblos, masyarakat kebingungan saat mencoblos dan memakan waktu yang lama.

Selain banyaknya kertas suara yang harus di coblos oleh masyarakat, Pemilu 2019 juga di warnai isu nasional yaitu politik identitas, politik identitas yang di maksud ialah pembelahan kelompok pemilih antara nasionalis dan agama yang dalam hal ini agama Islam. Fenomena politik identitas sebelumnya telah mewarnai Pilkada Jakarta tahun 2017, di mana pada saat itu masyarakat di pecah yang seolah-olah ada kubu yang pro dengan nasionalis dan pro agama. Dalam keterkaitannya pada pemilu 2019, isu tersebut masih sangatlah kuat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Karena pada Pemilu 2019 hanya ada 2 calon Presiden dan Wakil Presiden, maka kelompok-kelompok yang menyebar isu politik identitas tersebut seolah-olah mengklasifikasikan pasangan calon ada yang seolah-olah pro Agamis dan pro Nasionalis untuk mempengaruhi dukungan masyarakat yang mana di huni oleh mayoritas masyarakat beragama Islam. Namun di sisi lain isu terebut juga menimbulkan kekhawatiran dan kewaspadaan masyarakat saat menggunakan hak pilihnya, karena kejadian di lapangan kelompok-kelompok yang memakai isu agama cenderung lebih ekstrim untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Kejadian-kejadian tersebut harus di antisipasi oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, oleh karena itu KPU wajib memfasilitasi pemilih sehingga dapat memberikan suaranya secara mudah melalui akses geografis yang mudah di jangkau / tidak jauh dari masyarakat, pelaksanaan yang aman dan tepat sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan dan tanpa ancaman serta masyarakat mudah memahami kertas suara yang akan di coblos dan meletakkan ke kotak suara yang telah di siapkan secara benar.

Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi, dimana rakyat secara langsung dilibatkan, di ikutsertakan di dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan. Dalam pelaksanaannya pun setiap warga Negara Indonesia menurut UU no.3 tahun 1999 dalam pasal 28 ialah warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai warga Negara yang pada waktu pemungutan suara untuk pemilihan umum sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.¹⁶

Sebagai warga Negara Indonesia, dalam pelaksanaan pemilu berdasarkan undang-undang yang telah di sahkan jika sudah memenuhi syarat yang telah di tentukan setiap warga Negara memiliki hak penuh atas suara yang di milikinya. Hak penuh yang di maksud dalam keterangan di sini ialah masyarakat dapat langsung menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS (tempat pemungutan suara) tanpa di wakikan.

Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah proses demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam proses

¹⁶ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_1999.htm,

demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses pemilu baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Haedar Nashir demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin “*power of the people*”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada sistem politik lainnya yang terdapat di hampir setiap bangsa dan Negara.¹⁷ Dalam pengertian lain demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang.¹⁸

Pendapat lain mengatakan demokrasi adalah sebuah paradok, di satu sisi dapat mengisyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik, namun di sisi lain bisa juga mengisyaratkan adanya keteraturan, kesetabilan dan konsensus. Kunci untuk mendamaikan paradok dalam demokrasi terletak pada cara kita memperlakukan demokrasi. Demokrasi seyogyanya juga diperlakukan semata-mata sebagai sebuah cara atau proses dan bukan sebuah tujuan apalagi disakralkan. Dengan demikian keteraturan, kesetabilan dan konsensus yang dicita-citakan dan dibentuk pun di posisikan sebagai hasil

¹⁷ Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 37.

¹⁸ M.Taupan, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 21

bentukan dari suatu proses yang penuh kebebasan, persuasi dan dialog yang bersifat konsensual.¹⁹

Dari berbagai macam pendapat di atas, dapat kita lihat bahwa sistem demokrasi adalah suatu sistem bernegara yang menyerahkan kekuasaannya berada di tangan rakyat baik dalam menjalankan pemerintahan di mana pemimpin itu di pilih langsung oleh rakyat maupun sistem penyelenggaraannya. Maka sudah seyogyanya Indonesia yang menganut sistem demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemilu rakyat menjadi peran utama dalam menentukan pemimpinnya. Dalam menentukan pilihannyapun masyarakat tidak boleh di intervensi dari oknum atau kelompok yang menginginkan suaranya dalam pemilu.

Dalam memilih pemimpin, setiap orang harus memperhatikan secara detail dan teliti, karena sebagai warga Negara yang baik yang taat terhadap aturan pemerintah kita di anjurkan untuk selalu mengikuti kotestasi pemilu di Indonesia. Berdasarkan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mewajibkan umat Islam untuk memilih pada pemilu. Hal tersebut tertuang dalam fatwa MUI tahun 2009 tentang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu. Fatwa itu berisi lima point terkait penggunaan hak pilih dalam pemilu. Pertama, pemilu dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Kedua, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Ketiga, imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan

¹⁹ Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1994), hlm. 8-9

ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Keempat, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Kelima, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.²⁰

Dari sudut pandang agama Islam tersendiri aturan memilih pemimpin, masyarakat menggunakan hak pilihnyaa serta menjauhi tindakan Golput itu di atur dalam kita suci Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an tindakan golput tersebut bagian dari pelanggaran. Hal tersebut di perkuat dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : *“Taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri diantara kalian”*.²¹

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan, berdasarkan analisa penulis menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam dalam hidup berbangsa dan bernegara diwajibkan mentaati pemimpin selama pemimpin itu tidak mengeluarkan kebijakan yang sifatnya menjerumuskan. Menggunakan hak suara dalam pemilu merupakan salah satu ketaatan kita terhadap pemerintah, karena

²⁰Andry Novellno, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190327172754-32-381240/mui-tak-ada-kata-haram-golput-tapi-wajib-memilih>

²¹ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59

pemilu itu di laksanakan atas dasar kesepakatan para pimpinan yang dalam hal ini tergabung dalam pemerintahan Indonesia.

Ayat Al-Qur'an di atas juga di kuatkan dalam dalam hadits Rasullullah SAW. Dalam hadits ini menunjukkan begitu seriusnya agama Islam memandang persoalan memilih pemimpin itu bagian dari menjalankan syariat agama serta menjalankan sunah nabi Muhammad SAW. Maka dalam tulisan ini akan di cantumkan hadits Rasullullah SAW yang menganjurkan umatnya untuk turut serta memilih pemimpin ialah sebagai berikut, Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wassallam* bersabda:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya : *“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.”*²²

Tidak di ragukan lagi keseriusan agama Islam dalam menganjurkan umatnya memilih pemimpin dalam suatu kelompok. Analisa penulis berdasarkan hadits di atas menunjukkan pentingnya seorang pemimpin ada dalam setiap perkumpulan, kelompok, organisasi dan tentunya sebuah Negara. Artinya jika kita sebagai umat islam dalam pelaksanaan pemilu ikut berpartisipasi menggunakan hak suara secara baik dan benar kita sudah di hitung mendapatkan pahala dari Allah SWT karena telah menjalankan syariat dan sunah Rasullullah SAW.

²² HR Abu Dawud dari Abu Hurairah

Ibnu Taimiyah dalam Assiyasah As-Syar'iyah Fi Ishlahi ra'i wa ra'iyah (etika politik Islam) dalam persoalan memilih pemimpin menyatakan pemimpin yang kafir sekalipun lebih baik daripada pemimpin muslim tetapi dzalim. Pendapat tersebut tidak lepas dari konteks sosial politik yang beliau alami. Namun dari pernyataan tersebut kita dapat melihat bahwa pentingnya seorang pemimpin, sampai Ibnu Taimiyah menganjurkan kaum muslimin tetap memiliki seorang pemimpin meskipun tidak ideal.²³

Seorang pakar politik Islam yang merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta KH Masykuri Abdillah saat di wawancara tim NU (Nahdlatul Ulama) Online di Gedung PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) mengatakan perlunya memilih pemimpin, di sini bahwa pertama sekali adalah warga NU harus ikut berpartisipasi di dalam politik ini, Jangan sampai menjadi golput tidak menggunakan hak pilihnya. Bahkan ikut berpolitik memilih pemimpin ini bisa menjadi wajib kifayah, yang bisa menjadi wajib ain karena ini menentukan masa depan bangsa Indonesia yang itu tidak hanya menentukan persoalan-persoalan keduniaan tapi juga persoalan-persoalan keagamaan.²⁴

Pendapat di atas menunjukkan bahwa memilih pemimpin dalam suatu proses pelaksanaan pemilu merupakan suatu anjuran baik dari sisi agama, hak dan ketaatan terhadap pemerintah. Maka taat dan menghormati terhadap kebijakan

²³ <http://delikjateng.com/wacana/memilih-pemimpin-menurut-ibnu-taimiyah/> di akses pada 02 Juni 2020.

²⁴ <https://www.nu.or.id/post/read/94239/kriteria-kriteria-nahdliyin-untuk-pilih-pemimpin> di akses pada 20 Februari 2020.

pemerintah bukan hal biasa melainkan perintah Negara dan Agama untuk rakyatnya agar senantiasa mematuhi pemerintah secara seksama.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu merupakan hasil bentukan pemerintah yang secara legalitas dapat di pertanggungjawabkan keabsahannya. Karena pembentukan KPU pun sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu telah di atur dalam undang-undang. Sebagai warga Negara yang baik, Golput bukan sebuah solusi untuk bangsa ini, yang terjadi jika angka Golput semakin tinggi maka akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemimpin yang terpilih pun di pertanyakan legitimasinya di tingkat masyarakat. Sebagai warga Negara yang baik seharusnya kita memberikan solusi serta dukungan penuh terhadap lembaga penyelenggara pemilu untuk ikut serta meningkatkan angka partisipasi memilih.

Dari fenomena yang telah di jelaskan, artinya KPU SUMSEL memiliki tantangan yang besar untuk mengatasi persoalan tersebut dan mencapai target nasional yang di canangkan, KPU pun di tuntutan harus mampu merubah paradigma masyarakat bahwa perilaku Golput bukanlah sebuah solusi yang konkrit. “Pada pemilu 2019 target nasional angka partisipasi memilih ialah sebesar 77,5%.”²⁵ Maka KPU SUMSEL harus memiliki strategi komunikasi yang tepat untuk melampaui target nasional yang telah di tetapkan. Karena dalam pelaksanaan Pemilu angka partisipasi merupakan elemen yang penting sebagai salah satu ukuran suksesnya penyelenggaraan Pemilu.

²⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu-optimistis-target-775-persen-partisipasi-pemilih-tercapai> di akses pada 25 Februari 2020

Beranjak dari prolog di atas, tentu ini menjadi sebuah kajian yang menarik untuk di bahas lebih mendalam, melihat fenomena angka golput yang cenderung meningkat sejak Pemilu di laksanakan pasca reformasi, tentu ini menjadi sebuah kajian yang menarik di teliti untuk memecahkan persoalan tersebut. Untuk itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI KOMUNIKASI KPU SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana strategi komunikasi KPU Sumatera Selatan dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019?
2. Evaluasi apa yang di lakukan KPU dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019?

C. Batasan Masalah

1. Strategi komunikasi menurut Hafied Cengara adalah suatu bentuk rencana-rencana penyampaian komunikasi yang terkait dengan kebijakan. Untuk itu penelitian ini membahas kebijakan KPU melalui strategi komunikasinya dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih.
2. KPU adalah lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan Pemilu baik tingkat nasional maupun sampai ketingkat daerah. Untuk itu penelitian ini hanya membataskan pada KPU Sumsel.

3. Partisipasi adalah suatu keterlibatan seseorang untuk mengikuti kontestasi atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan positif. Untuk itu penelitian ini hanya membataskan pada partisipasi di Sumsel.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi KPU Sumatera Selatan dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui evaluasi KPU Sumatera Selatan dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mengembangkan keilmuan, wawasan pemikiran serta pengetahuan dalam strategi komunikasi di KPU, khususnya dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi organisasi terkait untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih.
- b. Sebagai bahan evaluasi organisasi terkait dalam rangka pelaksanaan Pemilu di semua tingkatan.

3. Manfaat Akademik

Memberikan sumbangan karya tulis, pemikiran serta pandangan akademik bagi jurusan Studi Islam Program Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini mengenai “strategi komunikasi Pemilu” secara umum sebagai berikut: Pertama penelitian oleh Harold Y. Pattiasina, STISIP Kebangsaan Masohi dengan judul “Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah Pada Pemilu 2014”.²⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan strategi komunikasi politik PDI Perjuangan dalam memenangkan pemilu yaitu dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat, mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada, menyediakan diri untuk menampung aspirasi masyarakat, dan pempublikasian yang ditujukan untuk pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya maka dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi pemilu legislatif pada tahun 2014 di Kabupaten Maluku Tengah memang benar ada inisiatif dan berbagai cara dari pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah agar untuk menyampaikan segala bentuk program-kerja kepada masyarakat, berbagai cara dilakukan sebagai alat komunikasi politik partai PDIP seperti memberikan informasi kepada media masa, turun langsung menemui masyarakat dan juga

²⁶ Harold Y. Pattiasina, “*Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah Pada Pemilu 2014*”, jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 19 No. 1, April 2015: 17-27, dari <https://media.neliti.com/media/publications/124232-ID-strategi-komunikasi-politik-pdi-perjuang.pdf>

melakukan keterbukaan kepadapihak pemerintah dan pihak lembaga-lembaga politik lainnya yang ada di Kabupaten Maluku Tengah agar mempermudah mendapatkan simpatisan guna memenangkan pemilihan calon legislatif Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2014.

Keberhasilan strategi komunikasi partai dan caleg pada kegiatan kampanye untuk menciptakan respon positif dari masyarakat pemilih, banyak ditentukan dari pesan dan struktur pesan politik yang dirancangnya. Caleg perlu menyusun substansi pesan politik yang benar-benar sesuai dengan realita permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Perbedaan strategi komunikasi yang di gunakan dalam penelitian di atas dengan judul penelitian yang saya ambil ialah penelitian di atas terfokus penggunaan strategi komunikasinya untuk para kader partai yang mengikuti kontestasi politik dalam rangka meningkatkan perolehan suara partai dan calonnya. Sedangkan penggunaan strategi komunikasi yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai alat untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019, lebih terfokus pada pelaksanaannya yaitu KPU sebagai lembaga penyelenggara.

Selanjutnya penelitian oleh Tohap Hasugian, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul penelitian, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih” (Studi Pada Pemilih Pemula,

Perempuan dan Kelompok Marjinal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara).²⁷

Hasil penelitian menunjukkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pemilih kepala daerah 2018 sebesar 7,08%. Hal ini tidak terlepas dari strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan tingkat partisipasi pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan tahapan sosialisasi dengan program andalan “KPU goes to onan”. Pada segmen kelompok marjinal tidak dilakukan sehingga yang dilakukan hanya pada segmen pemilih pemula dan pemilih perempuan. Penerapan strategi pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi dengan urutan: Pertama, strategi penguatan dengan menciptakan kekokohan antara penyelenggara pemilihan. Kedua, strategi bujukan, KPU Kabupaten Dairi berusaha mengajak masyarakat agar terdaftar dan mengecek nama mereka dalam proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih serta menerima pesan-pesan yang disampaikan pada tahapan sosialisasi. Ketiga, strategi rasionalisasi, KPU Kabupaten Dairi kurang berhasil melakukan strategi rasionalisasi terhadap pemilih karena hanya memastikan pemilih terdaftar dalam daftar pemilih dan mengajak pemilih untuk mencoblos pada saat pemilihan. Keempat, Strategi konfrontasi, KPU Kabupaten Dairi kurang maksimal dalam melakukan strategi konfrontasi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih dan pada tahapan sosialisasi.

²⁷ Tohap Hasugian, *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih*, (Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2019), dari <http://digilib.unila.ac.id/56237/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Penelitian di atas dalam penggunaan strategi komunikasinya terfokus pada kelompok-kelompok pemilih yang sudah memiliki hak suara, sedangkan dalam penelitian yang sedang di tulis penggunaan strategi komunikasinya secara *universal* (menyeluruh), di mana semua kelompok, semua elemen masyarakat yang telah memiliki hak pilih menjadi target sasaran supaya mereka benar-benar menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu.

Penelitian lainnya yaitu oleh, Daud M. Liando Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul “Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat” (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014).²⁸

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis, namun yang menjadi peroslan adalah terkait motivasi. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa ia memilih didorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. Visi dan misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih. Beberapa hal yang dissarankan dalam penelitian ini adalah UU kepemiluan perlu direvisi terutama terkait dengan persyaratan calon. Selama ini uu belum membatasi mana masyarakat yang layak menjadi calon dan mana yang tidak. Karena tidak ada batasan masyarakat kerap salah memilih atau tidak mau memilih karena tidak menyukai calon-calon yang disodorkan Penguatan kelembagaan partai politik perlu dilakukan karena mempengaruhi kinerja partai politik dalam melakukan kaderisasi. Kaderisasi yang

²⁸ Daud M. Liando, “*Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat*”, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 Edisi Oktober, dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/viewFile/17190/16738>

buruk dari partai politik menyebabkan calon-calon dari parpol minim kualitas sehingga calon tidak bisa menghindari money politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih. Kualitas penyelenggara terutama ditingkat panitia ad hoc perlu dimaksimalkan. Terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara karena masalah-masalah teknis. Sosialisasi KPU kepada masyarakat perlu digiatkan pula. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mendapat informasi yang jelas terkait kewajiban pemilih. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima undangan sebagai syarat untuk mencoblos.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di tentukan oleh faktor-faktor pendukung di antaranya ialah money politik dan surat undangan untuk mencoblos, sementara dalam judul penelitian ini membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih sebagai warga Negara yang baik dan turut mendukung program pemerintah dalam menentukan pemimpin.

G. Kerangka Teori

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu teori, karena teori memiliki peran yang penting guna menunjang keberhasilan suatu penelitian. Tanpa adanya teori dalam penelitian, maka sebuah persoalan yang diteliti tidak dapat di selesaikan dengan baik. Untuk itu dalam penelitian ini akan diangkat beberapa teori sebagai acuan dan landasan berpikir penelitian.

Pertama teori strategi komunikasi menurut Hafied Cengara yang mengungkapkan strategi komunikasi adalah suatu bentuk rencana-rencana penyampaian komunikasi yang terkait dengan kebijakan untuk mencapai suatu

tujuan.²⁹ Teori ini secara singkat menjelaskan bahwa untuk memecahkan persoalan strategi komunikasi harus di mulai dari sebuah perencanaan penyampaian komunikasi yang telah di susun secara matang.

Menurut analisa peneliti, teori strategi komunikasi yang di ungkapkan oleh Hafied Cengara sangatlah tepat di terapkan untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam penelitian ini. Penulis menganggap strategi komunikasi yang di terapkan oleh KPU SUMSEL dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019 harus di awali dengan perencanaan yang matang. Pengambilan kebijakan KPU dalam melakukan sosialisasi harus di rencanakan terlebih dahulu supaya apa yang di sampaikan dapat di mengerti dan di terima oleh masyarakat sebagai sasarannya.

Selanjutnya sebagai teori pendukung dalam penelitian ini di ambil teori strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell. Laswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan “*Who Says What In Which Chnnel To Whom With What Effect?*”.

Untuk memantapkan strategi komunikasi yang di terapkan, maka segala sesuatunya harus di pertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dalam rumus Laswell tersebut. *Who?* (Siapakah komunikatornya?), *Says What?* (Pesan apa yang dinyatakannya?), *In Which*

²⁹ Hafied Cangara, *Perencanaan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 61

Channel? (Media apa yang digunakannya?), *To Whom?* (Siapa komunikannya?), *With What Effect?* (Efek apa yang diharapkannya?).³⁰

1. Komunikator

Dalam teori strategi komunikasi yang di maksud dengan komunikator adalah seorang yang mengirim pesan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pengirim pesan ialah dari pihak KPU baik secara kelembagaan ataupun unsur perorangan yang memiliki hak *prerogative* untuk menyampaikan pesan yang telah direncanakan. Dalam prosesnya pesan atau informasi yang akan dikirimkan berasal dari pemikiran atau perencanaan pengirim pesan, oleh sebab itu sebelum pengirim mengirimkan pesan, pengirim harus merencanakan terlebih dahulu pesan yang akan dikirimnya, supaya apa yang telah di sampaikanya dapat di pahami oleh penerima pesan.³¹

2. Pesan

Pesan yang dimaksud dalam strategi komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan yang disampaikan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara di antaranya melalui tatap muka, media komunikasi ataupun dalam berbentuk baliho, simbol dan tulisan dalam bentuk cetak. Isi pesan yang di sampaikan juga beragam, pesan yang disampaikan bisa berupa sebuah ilmu pengetahuan, informasi, himbauan, nasihat, hiburan serta ajakan.³²

³⁰ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet Ke-7, 2008), hlm. 29

³¹ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 17

³² Hafied Cangara, *Op.Cit.*, hlm.27

3. Media

Media yang dapat di gunakan dalam menyampaikan pesan di era modern ini sangatlah banyak dan beragam. Dalam proses penyampaian pesan perlu dikaji lebih mendalam agar pesan yang di sampaikan melalui media tersebut dapat di terima secara efektif oleh si penerima pesan sesuai dengan kemajuan zaman dan kebiasaan yang di gunakan masyarakat.

Dari berbagai macam media, untuk menyampaikan pesan kita dapat menggunakan media seperti radio, televisi, surat kabar, media social, baliho, umbul-umbul serta papan pengumuman, tetapi dari kesemua itu dapat di simpulkan saluran pokoknya adalah gelombang suara dan cahaya.³³ Dengan memanfaatkan media proses sosialisasi yang di lakukan akan terasa lebih mudah, hal ini cocok di gunakan oleh lembaga yang mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas.

4. Penerima Pesan

Penerima pesan dalam hal ini ialah masyarakat yang akan terlibat langsung dari pesan yang di sampaikan. Penerima pesan adalah pihak yang menjadi saaraan pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok masyarakat, komunitas, FGD (*Forum Group Discusion*). Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak di terima oleh penerima,

³³Arni Muhammad, Op.Cit., hlm.18

akan menimbulkan berbagai macam masalah yang seringkali menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan atau saluran.³⁴

5. Efek

Efek yang di harapkan dari proses strategi komunikasi ini adalah sebuah respon terhadap pesan yang di sampaikan oleh pengirim pesan. Dengan adanya reaksi yang di timbulkan, pengirim akan dapat mengetahui apakah pesan yang dikirimkan tersebut di interpretasikan sama dengan apa yang di maksudkan oleh pengirim atau sebaliknya. Jika arti pesan yang di maksudkan oleh pengirim di interpretasikan sama oleh penerima berarti komunikasi tersebut efektif.³⁵

Kedua teori di atas peneliti menganggap sangatlah tepat di gunakan untuk memecahkan permasalahan dan menggali strategi komunikasi KPU Sumsel dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pemilih. Karena untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan di butuhkan sebuah perencanaan komunikasi yang matang selanjutnya di kombinasikan dengan elemen-elemen strategi komunikasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Elemen-elemen strategi komunikasi yang telah di jelaskan sebelumnya apabila di jawab dengan menggunakan metode teori strategi komunikasi yang sudah di pilih dan di tetapkan maka akan sangat membantu peneliti dalam menggali informasi serta mengetahui strategi komunikasi KPU SUMSEL dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih.

³⁴ Hafied Cangara, Op.Cit., hlm.28

³⁵ Arni Muhammad, Op.Cit., hlm.18

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif di anggap penulis sebagai metode yang tepat untuk mengetahui strategi komunikasi yang di gunakan oleh KPU SUMSEL dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019. Metode penelitian kualitatif dalam memecahkan masalah yang di teliti menggunakan cara survey yang diteliti secara langsung terhadap subjek penelitian yang dijadikan sebagai responden melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.³⁶

Ada beberapa pertimbangan yang peneliti kaji mengapa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diantaranya ialah Pertama, Menyesuaikan dengan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Yang di maksud dengan penelitian lapangan menurut Suharismi Arikunto dalam buku dasar-dasar research penelitian lapangan adalah Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.³⁷

³⁶ Lexy J Moloeng, *metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2005), cet. Ke XXI, hlm. 10.

³⁷ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung : Tarsoto 1995), hlm. 58

Dengan menggunakan penelitian lapangan, peneliti akan lebih mudah mendapatkan data-data yang di butuhkan untuk mengetahui strategi komunikasi KPU SUMSEL dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019. Karena jika berbicara terkait angka partisipasi pemilih tentu harus mengambil data dari hasil lapangan. Dari hasil data lapangan itulah yang akan diolah oleh penulis untuk mengetahui strategi komunikasi yang di gunakan oleh KPU.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian melalui studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.³⁸

Dengan memanfaatkan pendekatan penelitian secara studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan data yang di butuhkan dari semua pihak terutama data dari objek penelitian yaitu KPU SUMSEL. Dari KPU SUMSEL peneliti dapat memperoleh sumber data yang beragam, dalam kaitannya angka partisipasi pemilih tentu KPU SUMSEL memiliki data tersebut, dan data yang telah di peroleh akan di kombinasikan dengan data lain yang di peroleh seperti kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah ketua KPU Sumatera Selatan Dra. Kelly Mariana sebagai informan utama, selanjutnya Komisioner KPU Sumatera

³⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 10

Selatan bidang Sosialisasi Amrah Muslimin, SE.,MM dan Komisioner KPU bidang perencanaan, data dan informasi Hendri Almawijaya, M.Pd yang di sediakan oleh KPU Sumatera Selatan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.³⁹ Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai data primer untuk di wawancara adalah ketua KPU Sumatera Selatan Dra. Kelly Mariana sebagai informan utama, selanjutnya Komisioner KPU Sumatera Selatan bidang Sosialisasi Amrah Muslimin, SE.,MM dan Komisioner KPU bidang perencanaan, data dan informasi Hendri Almawijaya, M.Pd. Langkah yang di ambil untuk menentukan data primer ialah atas rekomendasi yang di tunjuk oleh Hj. Kelly Mariana selaku ketua KPU SUMSEL sebagai informan utama penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang di keluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan.⁴⁰ Data sekunder dalam penelitian ini di dapat dari hal-hal yang telah di lakukan oleh KPU dalam rangka mensosialisasikan programnya serta dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Ed. 1. Cet. 3 PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 29.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari informasi guna mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Selanjutnya peneliti menetapkan dan mendesain cara merekam wawancara tersebut. Wawancara yang sudah direkam harus dijaga dan ditempatkan di tempat yang baik, sehingga kualitas suara partisipan tetap terjaga, karena nantinya akan diputar dan didengar berkali-kali untuk dianalisis.⁴¹ Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap strategi KPU Sumatera Selatan dalam menekan angka golput.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet ke-8 2009), hlm. 145.

telepon.⁴² Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dua jenis pertanyaan. Pertama, wawancara terstruktur yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis sebagai panduan (*interview guide*). Dan kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara spontan dan merupakan perkembangan dari daftar pertanyaan yang ada, sifatnya informal. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pihak KPU Sumatera Selatan. Hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam wawancara yaitu bagaimana strategi komunikasi KPU Sumatera Selatan dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁴³ Dengan tehnik ini peneliti berusaha memperoleh data atau informasi dengan cara menggali dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip dan catatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas KPU Sumatera Selatan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke-15 2013), hlm. 198

⁴³ *Ibid.*, hlm. 201.

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁴ Semua data tersebut dapat digunakan untuk menambah wawasan peneliti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis isi (*analisis content*) kualitatif. Jenis penelitian ini lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Dalam analisis isi media kualitatif semua jenis data atau dokumen yang dianalisis lebih cenderung disebut dengan istilah “text” apapun bentuknya gambar, tanda, simbol, gambar bergerak, dan sebagainya. Atau dengan kata lain yang disebut dokumen dalam analisis isi kualitatif ini adalah wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam/ didokumentasikan atau disimpan untuk dianalisis. Analisis isi media kualitatif ini merujuk pada metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.⁴⁵

Pendapat lain mengatakan analisis isi kualitatif adalah suatu analisis isi yang lebih mendalam dan detail untuk memahami produk isi media dan mampu menghubungkannya dengan konteks sosial atau realitas yang terjadi sewaktu pesan dibuat. Karena semua pesan (teks, simbol, gambar dan sebagainya) adalah produk sosial dan budaya masyarakat. Analisis isi kualitatif bersifat sistematis, analitis tapi tidak kaku seperti dalam analisis isi kuantitatif. Kategorisasi dipakai

⁴⁴ Sugiyono, *Op.Cit*; hlm. 243.

⁴⁵ Burhan Bungin., *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 203

hanya sebagai guide, diperbolehkan konsep-konsep atau kategorisasi yang lain muncul selama proses riset.⁴⁶

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan penelitian yang berlandaskan dengan metode analisis isi ini memanfaatkan hasil wawancara yang di jadikan dalam bentuk tertulis di analisa isinya. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara, observasi, data yang berupa dokumen serta foto kegiatan berikutnya penulis menganalisa dan di tuangkan dalam bentuk tertulis. Selain itu untuk melengkapi penelitian ini penulis juga menganalisa setiap sosialisasi yang di lakukan oleh KPU SUMSEL.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai tahapan awal yang menjadi landasan dari keseluruhan isi tesis, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi konsep, strategi dan teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan topik yang dibahas atau diteliti serta kerangka pemikiran tentang Strategi Komunikasi KPU Sumatera Selatan dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

Bab III Gambaran Umum dan objek penelitian KPU Sumatera Selatan. Bab ini berisikan sejarah KPU Sumatera Selatan, visi misi, struktur organisasi dan lain-lain dari KPU Sumatera Selatan.

⁴⁶ Rahmat Kriyanto., *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : PT. Kencana Perdana, 2006), hlm. 247.

Bab IV Analisis terhadap objek penelitian. Bab ini menjelaskan bagaimana strategi komunikasi KPU dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih serta mengetahui evaluasi yang telah di buat KPU untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat, meliputi pendekatan dan jenis penelitian yang dipakai, sebagai jawaban atau solusi dari permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup. Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan penelitian serta saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian sehingga dapat menjadi perbaikan untuk selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry Novellno, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190327172754-32-381240/mui-tak-ada-kata-haram-golput-tapi-wajib-memilih>
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2014). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Effendy, Onong Uchjana. (2007). *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fatah, Saefullah. (1994). *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- <http://digilib.unila.ac.id/56237/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/viewFile/17190/16738>
- http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_1999.htm,
- <http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>
- <https://media.neliti.com/media/publications/42411-ID-perspektif-partisipasi-politik-masyarakat-pada-pemilihan-kepala-daerah-pilkada-k.pdf>
- <http://www.rmolsumsel.com/read/2014/05/01/5619/Partisipasi-Pemilih-di-Sumsel-76.49-Persen->
- Liliweri, Alo. (2014). *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- M. Hariwijaya dan Triton P.B.. (2011). *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Oryza.
- Nashir, Haedar. (1999). *Pragmatisme Politik Kaum Elite*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruslan, Rosady. (2006). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taupan, M. (1989). *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudi Abdullah <https://www.antaranews.com/berita/868612/partisipasi-pemilu-di-sumsel-814-persen>
- Yulistyo Pratomo, <https://m.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>,